



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PATI TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia_Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AKB) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024.

LKjIP Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk komitmen Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan LKjIP Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2024 prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati ini tentu tidak lepas dari kekurangan dan kendala yang

dihadapi. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi perbaikan kinerja yang lebih baik. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Pati.

Pati, Februari 2024
Kepala Dinas Sosial P3AKB
Kabupaten Pati



INDRIYANTO, S.H., M.I
Pembina Utama Muda
NIP. 1967026 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	I-1
2. Data Umum Organisasi	I-2
3. Struktur Organisasi.....	I-3
4. Sistematika Penyajian LKjIP	I-22
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Rencana Strategis 2023 – 2026	II-1
2. Rencana Kerja Tahun 2024	II-5
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
2. Realisasi Anggaran	III-7
 BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance, diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Sosial Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AKB) Kabupaten Pati yang mempunyai tugas urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati berkewajiban melaksanakan urusan wajib tersebut yaitu:

1. Urusan Sosial
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Urusan wajib pertama yaitu urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyangkut proses pembangunan sumber daya manusia di segala bidang dan tingkatan pada dasarnya mensyaratkan keikutsertaan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Pada tahun 2024, menurut data jumlah penduduk Kabupaten Pati sejumlah 1.385.904 dengan penduduk laki-laki sejumlah 687.717 (49,62%) dan penduduk perempuan sebanyak 698.187 (50,38), hal ini berarti terdapat selisih 0,76 % untuk jumlah penduduk laki-laki.

Urusan Wajib kedua yaitu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan prioritas pembangunan pada saat ini, salah satunya melalui

peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana.

Dalam rangka pengendalian penduduk di Kabupaten Pati, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati berupaya dalam meningkatkan penggunaan alat dan obat kontraepsi. Pada tahun 2024 peserta aktif KB sebesar 70.09 %.

2. Data Umum Organisasi

2.1. Dasar Hukum

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AKB) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan Pembangunan keluarga, serta tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan Pembangunan keluarga;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

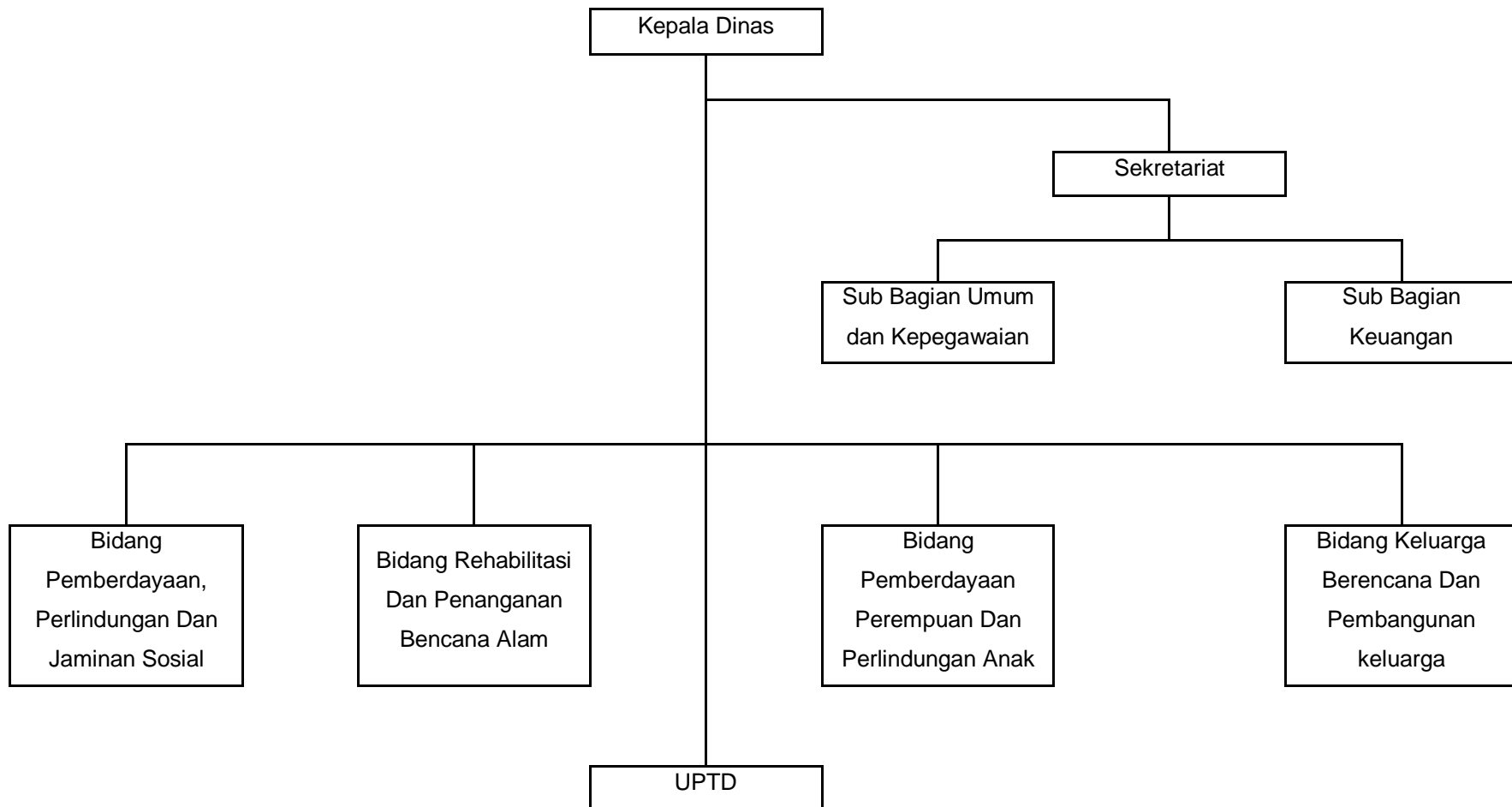
Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, membawahi :

- a. Sekretaris membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Penanganan Bencana Alam;
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga
- f. UPTD.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati



3.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan Pembangunan keluarga, serta tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Berdasarkan struktur organisasi diatas, di masing-masing bidang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- 1) Merumuskan Dan Menetapkan Program Dan Rencana Kerja Serta Rencana Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- 2) Menelaah Dan Mengkaji Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Pelaksanaan, Dan Petunjuk Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Guna Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- 3) Membina, Mengarahkan, Dan Memberi Petunjuk Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Serta Mendistribusikan Tugas Kepada Bawahan Sesuai Tugas Dan Fungsinya Agar Tugas-tugas Dapat Diselesaikan Dengan Tepat, Efektif Dan Efisien;
- 4) Menyelenggarakan Koordinasi Baik Vertikal Maupun Horizontal Guna Sinkronisasi Dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas;
- 5) Merumuskan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga;
- 6) Mengoordinasikan Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Secara

Berkala Sesuai Dengan Bidang Permasalahan Guna Terwujudnya Keterpaduan Pelaksanaan Tugas;

- 7) Menyelenggarakan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Dengan Petunjuk Teknis Dan Ketentuan Yang Berlaku Guna Kelancaran Pelaksanaan Tugas;
- 8) Menyelenggarakan Pembinaan Dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Guna Terwujudnya Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas;
- 9) Menyelenggarakan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sesuai Dengan Ketentuan Secara Berkala Sebagai Bahan Kebijakan Lebih Lanjut;
- 10) Mengarahkan Dan Mengendalikan Pelaksanaan Program Kesekretariatan, Bidang Rehabilitasi Dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Agar Terkendali Dalam Penyelenggaraan Kegiatan;
- 11) Mengevaluasi Dan Menilai Prestasi Kerja Bawahan Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai Dan Perilaku Kerja Sesuai Ketentuan Dalam Rangka Peningkatan Karier, Pemberian Penghargaan Dan Sanksi;
- 12) Melaporkan Pelaksanaan Program Dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan pembangunan Keluarga Baik Secara Lisan Maupun Tertulis Kepada Bupati Sebagai Wujud Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaksanaan Tugas; Dan

13) Melaksanakan Tugas Kedinasan Yang Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan, Baik Lisan Maupun Tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi, serta mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbagian Perencanaan dan Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) pengelolaan dan pelayanan perencanaan dan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- 2) Merancang pengelolaan sistem informasi manajemen dinas sebagai bahan informasi dinas;
- 3) Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul

- 5) Mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 7) Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
- 9) Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- 10) Menyusun rencana strategis dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksanaan tugas;
- 11) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
- 12) Menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- 1) Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;

- 2) Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- 3) Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- 4) Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- 2) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
- 3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Rehabilitasi Dan Penanganan Bencana Alam

Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Pasca Bencana Alam mempunyai uraian tugas:

- 1) merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam sebagai bahan kajian pimpinan;
- 2) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- 3) menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam, meliputi :
 - a) Memfasilitasi penyediaan permasalahan untuk rumah singgah;
 - b) Memfasilitasi penyediaan alat bantu untuk disabilitas;
 - c) Melaksanakan pemberian final fisik, mental, spiritua l dan sosial untuk orang dengan gangguan jiwa(odgj);
 - d) Melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan masyarakat;
 - e) Memfasilitasi pemberian bingkisan kepada anak yatim piatu;

- f) Melaksanakan penanganan bencana alam/sosial (droping program bencana alam) dan pengiriman logistik;
 - g) Memfasilitasi pelaksanaan adopsi anak; dan
 - h) Melaksanakan layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- 4) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaandan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:

- 1) merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan mengendalikan sebagai bahan kajian pimpinan;
- 2) mengarahkan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan data

yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;

- 3) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan, meliputi:
 - a) melaksanakan fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, Lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;
 - b) melaksanakan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender serta melaksanakan evaluasi dan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi informatika edukasi pengarusutamaan gender sesuai dengan petunjuk teknis untuk pelaksanaan program Pemberdayaan perempuan yang responsif gender;
 - c) melaksanakan pengarusutamaan gender, menyelenggarakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten sesuai petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;
 - d) menyelenggarakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta mengintegrasikan upaya perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana sesuai dengan petunjuk teknis untuk usaha perlindungan terhadap perempuan;

- e) memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial sesuai dengan petunjuk teknis untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
 - f) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender serta memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah dan melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi masalah di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan petunjuk teknis untuk pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan;
 - g) melakukan advokasi sosialisasi dan mediasi program perlindungan perempuan sesuai dengan petunjuk teknis untuk peningkatan kesetaraan gender;
 - h) melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan petunjuk teknis meningkatkan pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan; dan
 - i) mengoordinasikan penyediaan fasilitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, melaksanakan mediasi dalam penanganan kasus, memberikan keterampilan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk pemulihan psikis perempuan dari tindak kekerasandan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) agar dapat hidup secara normal dalam masyarakat;
- 4) menyelenggarakan kegiatan perlindungan anak, meliputi:
- a) melaksanakan verifikasi layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, bahan

pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak serta pendataan korban secara terpilah sesuai dengan petunjuk teknis sebagai Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;

- b) melaksanakan pelatihan, pelaksanaan magang dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan anak bagi sumber daya manusia pengelola lembaga layanan sesuai dengan petunjuk teknis dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan para pengelola lembaga layanan;
- c) melaksanakan kunjungan lapangan dan melakukan analisis, serta evaluasi sesuai dengan petunjuk teknis sebagai upaya penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak;
- d) melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak serta memfasilitasi pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis untuk perlindungan anak;
- e) melaksanakan kegiatan dan menyelenggarakan dukungan operasional, menetapkan sasaran, menyelenggarakan pelayanan serta menetapkan prioritas kegiatan, menyelenggarakan kemitraan, menetapkan fasilitasi dan melaksanakan kegiatan serta memanfaatkan tenaga sumber daya manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya baik antara sektor pemerintah dan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat sebagai upaya penanganan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai dengan petunjuk teknis untuk melindungi generasi muda dari bahaya HIV AIDS, Infeksi Menular Seksual serta

Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya(NAPZA);
dan

- f) melaksanakan pelayanan administrasi di bidang perlindungan anak dan remaja serta pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan anak dan remaja sesuai dengan petunjuk teknis untuk pengambilan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan keluarga berencana serta penggerakan dan pembangunan keluarga.

Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan penggerakan serta pembangunan keluarga;
- 2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana serta penggerakan dan pembangunan keluarga;
- 3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keluarga berencana serta penggerakan dan Pembangunan keluarga; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai uraian tugas:

- 1) merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan keluarga berencana dan penggerakan serta pembangunan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;

- 2) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan penggerakan serta Pembangunan keluarga berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- 3) menyelenggarakan kegiatan keluarga berencana dan penggerakan, meliputi:
 - a) melaksanakan advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada stakeholder dan mitra kerja;
 - b) melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai kearifan lokal;
 - c) menyediakan dan mendistribusikan sarana komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - d) melaksanakan kegiatan promosi, serta komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang;
 - e) mengendalikan pendistribusian Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana kefasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
 - f) meningkatkan kepesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
 - g) menyediakan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana; dan
 - h) membina pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
- 4) menyelenggarakan kegiatan pembangunan keluarga, meliputi:
 - a) melaksanakan pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina

- Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor);
- b) melaksanakan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, pemberdayaan ekonomi keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);
 - c) menyediakan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);
 - d) melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);
 - e) melaksanakan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;
- 5) melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, meliputi:
- a) menyusun dan memanfaatkan *grand design* pembangunan kependudukan;
 - b) menyediakan data dan informasi keluarga; dan
 - c) mengolah dan melaporkan data pengendalian lapangan dan pelayanan keluarga berencana;

- 6) melaksanakan pemberdayaan tenaga Penyuluh keluarga berencana (Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana), meliputi:
 - a) mengelola operasional dan sarana di balai penyuluhan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
 - b) melaksanakan mekanisme operasional program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui rapat koordinasi kecamatan, rapat koordinasi desa dan mini lokakarya;
 - c) mengendalikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
 - d) menggerakkan kader institusi masyarakat;
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Jumlah dan Kualifikasi Pegawai

Susunan dan Komposisi SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai ASN : 21 Orang dengan rincian 13 laki-laki dan 8 perempuan
- b. Kualifikasi pegawai berdasarkan status Pendidikan:
 - 1) Pasca Sarjana (S2) : 7 orang (4 laki-laki, 3 perempuan)
 - 2) Strata I (S-1) : 10 orang (7 laki-laki, 3 perempuan)
 - 3) Sarjana Muda (D3) : 2 orang (1 laki-laki), 1 perempuan)
 - 4) SLTA : 2 orang (0 laki-laki, 2 perempuan)
- c. Kualifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan:
 - 1) Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang (1 laki-laki)
 - 2) Pembina Tk.I (IV/b) : 1 orang (1 perempuan)
 - 3) Pembina (IV/a) : 3 orang (2 laki-laki, 1 perempuan)
 - 4) Penata Tingkat I (III/d) : 4 orang (3 laki-laki, 1 perempuan)

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 5) | Penata (III/c) | : 2 orang (2 perempuan) |
| 6) | Penata Muda Tingkat I (III/b) | : 3 orang (2 laki-laki
1 perempuan) |
| 7) | Penata Muda (III/a) | : 2 orang (1 laki-laki,
1 perempuan) |
| 2 | Pengatur Tingkat I (II/d) | : 2 orang (1 laki-laki,
1 perempuan) |

3.4. Tantangan, Peluang dan Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah, ada beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati diantaranya adalah :

3.3.1. Tantangan

- a. Meningkatnya kemiskinan dikarenakan lesunya ekonomi yang mengakibatkan banyak PHK;
- b. Kurangnya pengetahuan tentang pengarusutamaan gender dan kelesuan ekonomi yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Adanya kepercayaan tertentu tentang larangan KB;
- d. Kesulitan untuk memasarkan produk dari kelompok UPPKS

3.3.2. Peluang

- a. Adanya alokasi anggaran dari pusat untuk penanganan PMKS;
- b. Adanya dorongan dan keterlibatan banyak pihak tentang pengarusutamaan gender dan penanganan korban perempuan dan anak;
- c. Adanya anggaran DAK dari Pusati;
- d. Kemudahan media sosial untuk membantu memasarkan produk dari kelompok UPPKS.

3.3.3. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati adalah:

- a. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- b. Peningkatan pemberdayaan perempuan di daerah;
- c. Laju Pertumbuhan Penduduk tinggi

3.4. Strategi dan Kebijakan

Dengan melihat tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang dihadapi Bappeda Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

3.4.1. Strategi

Ada beberapa strategi yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan Sosial;
- b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- c. Rehabilitasi Sosial
- d. Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- e. Penanganan Bencana;
- f. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Perlindungan Perempuan;
- h. Peningkatan Kualitas Keluarga;
- i. Perlindungan Khusus Anak;
- j. Pengendalian Penduduk;
- k. Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- l. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

3.4.2. Kebijakan

Sedangkan kebijakan yang ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- c. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

- d. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota;
- e. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

4. Sistematika Penyajian LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan mengenai Gambaran umum Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama/ isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati.

Bab II : Perencanaan Kinerja;

Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran

Bab IV : Penutup

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2023 – 2024

Rencana Strategis Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama empat tahun ke depan berdasarkan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan atau pada saat Renstra ini berakhir tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati adalah :

- 1) Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 2) Meningkatnya pemberdayaan perempuan di daerah;
- 3) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.

b. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dalam jangka menengah sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan Bappeda Kabupaten Pati untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam hal ini sasaran jangka menengah Dinas Sosial P3AKB Kab. Pati adalah:

- 1) masalah kesejahteraan sosial;

- 2) Meningkatnya kesetaraan gender serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Menurunnya angka kelahiran;
- 4) Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga Sejahtera.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati tahun 2023-2026.

Untuk capaian kinerja Dinas Sosial P3AKB selama kurun waktu 2023 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini;

Tabel 2.1
Pencapaian kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2024

No	Indikator	Target Renstra				Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indikator Tujuan								
1	Persentase Penurunan PMKS	5,83	5,82	5.81	5.80	3,85	5.81	5.80	
2	Indeks pemberdayaan perempuan (IDG)	67,10	68.00	69.15	71.05	63,07	69.15	71.05	
3	pertumbuhan penduduk	1,12	1,15	1,18	1,21	0,84	1,18	1,21	
	Indikator Sasaran								
1	Persentase Penurunan PMKS	5.83	5,82	5.81	5.80	3,85	5.81	5.80	
2	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	1,9	2,0	2,1	2,2	7,19	2,1	2,2	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	74.18	76.01	77.93	79.83	68,63	77.93	79.83	

No	Indikator	Target Renstra				Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.000003	0.000005	0.000005	0.000005	0,00072	0.000005	0.000005	
5	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.66	1.66	1.66	1.66	1,26	1.66	1.66	
6	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	59.66	60.00	60.25	60.50	65,79	60.25	60.50	

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

Dengan memperhatikan rencana strategis yang merupakan perencanaan jangka menengah, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2024 menetapkan kinerja tahunan yang didalamnya berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang didukung oleh program/kegiatan serta anggarannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Rencana Anggaran
Persentase Penurunan PMKS	5,82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.811.191.000
			Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.176.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.000.000
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	9.000.000
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.000.000
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.176.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.788.554.000
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.768.554.000
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.000.000
				Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		3.000.000

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Rencana Anggaran
				Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	3.000.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.212.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000
				Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3.000.000
				Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.212.000
				Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	50.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.928.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.102.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.354.000
				Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	8.010.000
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	177.772.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	162.190.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	8.500.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	662.905.000
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	310.732.000
				Pengadaan Mebel	110.703.000
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	241.470.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	896.317.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.548.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	97.000.000
				Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12.250.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.519.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.099.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	154.235.000

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Rencana Anggaran
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	606.864.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			5.037.314.000
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	5.037.314.000
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.037.314.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.620.000.000
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1.620.000.000
				Penyediaan Permakanan	190.000.000
				Penyediaan Sandang	5.000.000
				Penyediaan Alat Bantu	1.360.000.000
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	50.000.000
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	15.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			77.000.000
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.000.000
				Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.000.000
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	76.000.000
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	76.000.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			85.000.000
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	73.100.000
				Penyediaan Makanan	65.100.000
				Penyediaan Sandang	8.000.000
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	11.900.000
				Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	11.900.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			179.800.000

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Rencana Anggaran
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	179.800.000
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	179.800.000
Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	2%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		125.585.000
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	76,01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	99.264.000
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,000005		Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	99.264.000
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.321.000
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	26.321.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		19.345.000
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3.450.000
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3.450.000
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.895.000
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.296.000
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.599.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		15.000.000

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Rencana Anggaran
			Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		25.000.000
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
			Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		135.500.000
			Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
			Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
			Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.500.000
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125.500.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		316.435.000
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000
			Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000
			Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189.200.000
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189.200.000

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Rencana Anggaran
			Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.235.000
			Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi Dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.235.000
Total Fertility Rate (TFR)	1,66	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		602.800.000
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60%		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	602.800.000
			Penyediaan Dan Pengolahan Data Kependudukan	6.000.000
			Pencatatan Dan Pengumpula Data Keluarga	332.200.000
			Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB	264.600.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		5.769.814.000
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.393.032.000
			Pengendalian Program KKBPK	58.720.000
			Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	495.432.000
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) Dan Mini Lokakarya (Minilok)	314.790.000
			Promosi Dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	200.600.000
			Advokasi Program Bangsa Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja	323.490.000
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.567.721.000
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.136.800.000

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Rencana Anggaran
				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan Dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	430.921.000
				Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1.923.311.000
				Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	476.200.000
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.411.399.000
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	35.712.000
				Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	885.750.000
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB	3.530.000
				Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas	882.220.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.813.568.000
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	347.568.000
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	44.568.000
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	288.000.000
				Pembentukan Kelompok Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Dna Konseling Remaja (PIK-R), Bina	15.000.000

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Rencana Anggaran
				Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	
				Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	6.466.000.000
				Pendayagunaan Mitra Kerja Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000
				Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	30.000.000
				Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	3.060.000.000
				Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	3.366.000.000
Total					26.633.352.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Selain itu akan disajikan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan anggaran kegiatan tahun 2024 dengan realisasi keuangannya

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati melakukan pengukuran kinerja ini dilakukan secara tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kala Pengukuran Kinerja

Range	Keterangan
85 s/d 100	Sangat Berhasil (SB)
70 s/d < 85	Berhasil (B)
55 s/d <70	Cukup Berhasil (CB)
0 s/d <55	Tidak Berhasil (TB)

3.1.1. Capaian Tujuan dan Sasaran

Hingga akhir tahun 2024, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

Tujuan I : Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;

Tujuan pertama adalah urusan sosial. Untuk mengukur pencapaian tujuan pertama dan sasarnya telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran. Adapun capaian indicator tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Tujuan 1 dan Sasaran

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;	Persentase Penurunan PMKS	5,82	3,85
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;	Persentase Penurunan PMKS	5,82	3,85

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1 yaitu Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, dari indikator kinerja Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai tolak ukurnya pencapaian kinerja Tahun 2024 melampaui target. Adapun kendala – kendala antara lain :

- a. Budaya menerima bantuan tidak ada rasa malu;
- b. Data di lapangan dari berbagai sumber sehingga sulit diukur.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Selalu diadakan perbaikan dan pemadanan desa;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait PMKS;
- c. Memberikan batasan / persyaratan yang ketat terhadap penerima bantuan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Graduasi kepada KPM;
- b. Menggunakan data tunggal.

Tujuan II : Meningkatnya pemberdayaan perempuan di daerah

Tujuan kedua adalah tentang urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Untuk mengukur pencapaian tujuan kedua dan sasarnya telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran. Adapun capaian indikator tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024
Meningkatnya pemberdayaan perempuan di daerah;	Indeks pemberdayaan perempuan (IDG)	68,00	63,07
Meningkatnya kesetaraan gender serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	2,0%	7,19%
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	76,01	68,63

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.000005	0,00072

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan kedua yaitu Meningkatnya pemberdayaan perempuan di daerah dari indikator Indeks pemberdayaan perempuan (IDG) sebagai tolak ukurnya pencapaian kinerja Tahun 2024 belum belum memenuhi target. Adapun kendala – kendala antara lain :

- a. Keterbatasan Sumber Daya, seperti kekurangan tenaga kerja terampil, keterbatasan anggaran, atau kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional;
- b. Kondisi Ekonomi yaitu Resesi atau fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli pelanggan atau biaya operasional;
- c. Regulasi Pemerintah: Perubahan kebijakan atau regulasi yang mengubah cara bisnis dijalankan atau menambah biaya operasional.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Evaluasi dan penyempurnaan strategi;
- b. Optimalisasi sumber daya;
- c. Peningkatan proses internal;

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- b. Peningkatan keterampilan SDM;
- c. Evaluasi dan penyempurnaan proses kerja.

Tujuan III : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.

Tujuan ketiga berurusan dengan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga. Untuk mengukur pencapaian tujuan ketiga dan sasarnya telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran. Adapun capaian indikator tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase tingkat pertumbuhan penduduk	1,15	0,84
Menurunnya angka kelahiran;	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,66	1,26
Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,00	65,79

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan ketiga yaitu Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari indikator Persentase tingkat kesejahteraan keluarga sebagai tolak ukurnya pencapaian kinerja Tahun 2024 melampaui target. Adapun kendala – kendala antara lain :

- Terbatasnya tenaga lapangan dalam sosialisasi
- Sulitnya memasarkan produk UPPKA

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur;
- Menekan angka unmet need;
- Membuat sosialisasi atau kegiatan terkait tentang ketahanan keluarga baik bagi UPPKA, BKB, BKR, dan BKL.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi alat dan obat kepada calon akeptor pasca salin (melahirkan);
- b. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang terkait ketahanan keluarga.

3.1.2. Capaian Program

Pada Tahun 2024, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati melaksanakan 15 program, yang diantaranya 1 di urusan sekretariat, 5 program urusan sosial, 6 program urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, serta 3 program di urusan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Untuk mengukur capaian program adalah dengan ditetapkan indikator di masing-masing program. Adapun capaian program Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Program	Indikator	Target TA 2024	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Urusan Rutin Yang Terpenuhi Sesuai Standar	100%	100%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Kecamatan Yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data PMKS	100%	100%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhannya Di Luar Pant (Indikator SPM)	0,7	0,7
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Desa Yang Melakukan Pemutakhiran Data Kemiskinan	100%	100%
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Yang Terpelihara	100%	100%
7	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD Yang Berpartisipasi Dalam Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	50%	100%

No	Program	Indikator	Target TA 2024	Realisasi
8	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Tertangani	100%	100%
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Yang Permasalahannya Tertangani	100%	100%
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Keterisian Data Gender Dan Anak	100%	100%
11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dan Dunia Usaha Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak	50%	50%
12	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%
13	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Cakupan Penyediaan Informasi Data Keluarga	100%	100%
14	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Presentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9%	7,62%
15	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Keluarga Yang Meningkatkan Kesejahteraan Keluarganya	60,00%	65,79%

3.2. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. untuk mewujudkannya perlu adanya laporan realisasi anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Untuk mempermudah laporan realisasi anggaran Dinas Sosial P3AKB Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial P3AKB Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date)	%	100	5.811.191.000	100	5.394.275.165
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	dokumen laporan	6 16	100.176.000	6 16	86.383.500
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	35.000.000	2	29.697.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	9.000.000	1	8.088.500
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	7.000.000	1	6.439.500
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	9.000.000	1	8.270.000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	8.000.000	1	4.877.500

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	9.000.000	12	8.073.000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	23.176.000	4	20.938.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	laporan dokumen	3 2	2.788.554.000	3 2	2.557.138.803
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	20	2.768.554.000	20	2.537.707.203
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	6.000.000	1	5.825.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	2	7.000.000	2	6.736.050
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	2	7.000.000	2	6.870.550
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan	2	3.000.000	2	2.740.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	3.000.000	2	2.740.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	paket dokumen orang	1 4 50	87.212.000	1 4 50	77.208.500
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	30.000.000	1	24.510.000
1.4.2	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2	3.000.000	2	2.725.000
1.4.3	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	4.212.000	2	3.373.500
1.4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50	50.000.000	50	46.600.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	buah paket dokumen laporan	1 6 4 500	511.928.000	1 6 4 500	483.661.520
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	buah	1	4.102.000	1	4.005.800
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	151.354.000	5	136.116.050

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	8.010.000	1	7.807.500
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	177.772.000	2	172.654.000
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	500	162.190.000	500	156.278.170
1.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	8.500.000	2	6.800.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	16	662.905.000	16	621.384.000
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	310.732.000	1	298.000.000
1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	10	110.703.000	10	105.270.000
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	241.470.000	5	218.114.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	34	896.317.000	34	838.426.780
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	5	2.548.000	5	2.548.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	97.000.000	12	81.723.078
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	5	12.250.000	5	11.294.570
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	784.519.000	12	742.861.132
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	77	761.099.000	77	727.332.062
1.8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	76	154.235.000	76	131.706.980
1.8.2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	606.864.000	1	595.625.082
						0	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kecamatan yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data PMKS	%	100	5.037.314.000	100	4.032.745.334
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya	orang	49	5.037.314.000	49	4.032.745.334

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	49	5.037.314.000	49	4.032.745.334
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Kecamatan yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data PMKS	%	100	1.620.000.000	100	1.598.757.000
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandangan pengemis di luar pengemis di luar panti sosial yang tertangani	orang	3.862	1.620.000.000	3.862	1.598.757.000
3.1.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	3.500	190.000.000	3.500	185.268.250
3.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	40	5.000.000	40	4.500.000
3.1.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	267	1.360.000.000	267	1.345.560.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	50.000.000	30	48.593.750
3.1.5	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	25	15.000.000	25	14.835.000
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	%	100	77.000.000	100	70.320.500
4.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar yang ditangani	orang	20	1.000.000	20	962.500
4.1.1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	1.000.000	20	962.500
4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	desa	406	76.000.000	406	69.358.000
4.2.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	keluarga	41.970	76.000.000	41.970	69.358.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	85.000.000	100	69.925.000
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam	orang	30.000	73.100.000	30.000	60.115.000
5.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15.000	65.100.000	15.000	52.115.000
5.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	15.000	8.000.000	15.000	8.000.000
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	desa	5	11.900.000	5	9.810.000
5.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	11.900.000	30	9.810.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara	%	100	179.800.000	100	176.322.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	TMP	1	179.800.000	1	176.322.000
6.1.1	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	dokumen	1	179.800.000	1	176.322.000
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	%	100	125.585.000	100	123.237.000
7.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan PPRG	OPD	26	99.264.000	26	98.026.000
7.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah	26	99.264.000	26	98.026.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi	Organisasi	1	26.321.000	1	25.211.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1	26.321.000	1	25.211.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	%	100	19.345.000	100	18.749.000
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	kali	2	3.450.000	2	3.050.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	3.450.000	2	3.050.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	Kasus	6	15.895.000	6	15.699.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	3	10.296.000	3	10.235.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	3	5.599.000	3	5.464.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	%	100	15.000.000	100	14.990.000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah	laporan	5	15.000.000	5	14.990.000
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	5	15.000.000	5	14.990.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterisian data gender dan anak	%	100	25.000.000	100	24.427.500
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Dokumen	25	25.000.000	25	24.427.500
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	25	25.000.000	25	24.427.500
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	%	100	135.500.000	100	128.485.320

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA	lembaga	20	10.000.000	20	9.980.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	lembaga	20	10.000.000	20	9.980.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE	lembaga	4	125.500.000	4	118.505.320
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	900	125.500.000	900	118.505.320
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	316.435.000	100	294.162.700
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	OPD	10	65.000.000	10	62.358.300

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	perangkat daerah	10	65.000.000	10	62.358.300
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	orang	11	189.200.000	11	171.291.550
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang	11	189.200.000	11	171.291.550
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	lembaga	8	62.235.000	8	60.512.850
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	dokumen	8	62.235.000	8	60.512.850
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	%	100	602.800.000	100	600.008.259
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data kependudukan dan KB	laporan	48	602.800.000	48	600.008.259
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	dokumen	6	6.000.000	6	5.430.500
	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	laporan	21	332.200.000	21	332.200.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	dokumen	21	264.600.000	21	262.377.759
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9	5.769.814.000	7,62	5.150.984.538
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	11	1.393.032.000	11	1.348.903.538
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian Program KKBPK	laporan	21	58.720.000	21	58.720.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	21	495.432.000	21	473.676.038
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan	21	314.790.000	21	314.790.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	21	200.600.000	21	198.122.500
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	organisasi	15	323.490.000	15	303.595.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader KB yang terlatih	Kader	427	1.567.721.000	427	1.532.313.000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	406	1.136.800.000	406	1.135.750.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan	21	430.921.000	21	396.563.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan	alkon	278	1.923.311.000	278	1.384.098.000
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	57	476.200.000	57	434.082.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	200	1.411.399.000	200	914.304.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	21	35.712.000	21	35.712.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kelompok	75	885.750.000	75	885.670.000
	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	dokumen	21	3.530.000	21	3.450.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	kampung KB	54	882.220.000	54	882.220.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	%	60	6.813.568.000	60	6.674.170.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina	Kelompok	1.285	347.568.000	1.285	208.170.000
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	dokumen	21	44.568.000	21	44.568.000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang Tersedia	unit	25	288.000.000	25	149.040.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	kelompok	1.239	15.000.000	1.239	14.562.000
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS	<i>kali</i>	1	6.466.000.000	1	6.466.000.000
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	4	10.000.000	4	10.000.000
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	laporan	1	30.000.000	1	30.000.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SAT	2024			
				TARGET		REALISASI	
				Fisik	Rp.	Fisik	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	laporan	21	3.060.000.000	21	3.060.000.000
	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calón PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	laporan	21	3.366.000.000	21	3.366.000.000

3.3. Inovasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada, atau pengenalan hal-hal yang baru. Inovasi dapat memiliki berbagai tujuan, seperti: Meningkatkan kualitas, Menciptakan pasar baru, Menjadi pengganti produk sebelumnya, Melebarkan jaringan.

Di dalam kegiatan di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, inovasi sangat diperlukan guna menunjang pelayanan publik terhadap Masyarakat agar selalu mengutamakan kualitas layanan. Beberapa pelayanan di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati adalah reaktivasi kesertaan PBI Kesehatan, Adopsi anak, Penyaluran alat bantu kepada disabilitas, pendampingan penanganan korban kekerasan berbasis gender, pendampingan keikutsertaan KB, dan lain-lain.

Pada tahun 2024 ini, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati berinovasi di kegiatan pelayanan untuk penyandang disabilitas. Inovasi berupa aplikasi baru agar penyandang disabilitas lebih mudah di dalam pengajuan bantuan sosial serta memudahkan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dalam mengintervensi kebutuhan para penyandang disabilitas. Aplikasi tersebut diberi nama Aplikasi Bantuan Penyandang Disabilitas Pati “ABANGDIPA”.

3.4. Penghargaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghargaan adalah perbuatan menghargai atau penghormatan. Penghargaan yang diterima oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah juara III Kategori Kabupaten Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Dari penyusunan Laporan Inerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2024. Ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan:

- a. Diadakannya perbaikan dan pemadanan desa
- b. Sosialisasi kepada masyarakat terkait PMKS;
- c. Memberikan batasan / persyaratan yang ketat terhadap penerima bantuan;
- d. Evaluasi dan penyempurnaan strategi;
- e. Optimalisasi sumber daya;
- f. Peningkatan proses internal;
- g. Meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur;
- h. Menekan angka unmet need;
- i. Membuat sosialisasi atau kegiatan terkait tentang ketahanan keluarga baik bagi UPPKA, BKB, BKR, dan BKL..

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut:

- a. Budaya menerima bantuan tidak ada rasa malu;
- b. Data di lapangan dari berbagai sumber sehingga sulit diukur;
- c. Keterbatasan Sumber Daya, seperti kekurangan tenaga kerja terampil, keterbatasan anggaran, atau kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung operasional;
- d. Kondisi Ekonomi yaitu Resesi atau fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli pelanggan atau biaya operasional;
- e. Regulasi Pemerintah: Perubahan kebijakan atau regulasi yang mengubah cara bisnis dijalankan atau menambah biaya operasional;
- f. Terbatasnya tenaga lapangan dalam sosialisasi;

- g. Sulitnya memasarkan produk UPPKA.

2. Strategi Peningkatan Kinerja


Strategi peningkatan kinerja yang akan ditempuh adalah:

- a. Graduasi kepada KPM;
- b. Menggunakan data tunggal;
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- d. Peningkatan keterampilan SDM;
- e. Evaluasi dan penyempurnaan proses kerja;
- f. Optimalisasi alat dan obat kepada calon akeptor pasca salin (melahirkan);
- g. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang terkait ketahanan keluarga.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2024 ini dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pati, Februari 2025

Kepala Dinas Sosial P3AKB
Kabupaten Pati



INDRIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670226 199203 1 005



GUBERNUR JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002.5/0004355

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 476/42 Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pemenang
Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024

Diberikan kepada :

KAMPUNG KB BAHAGIA SEJAHTERA KABUPATEN PATI

sebagai :

PERINGKAT III Kategori Kabupaten

Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Semarang, 21 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

Komjen Pol. (P) Drs. NANA SUDJANA, MM

